
**ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM
SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)**

Oleh:

Natasya Salsabila Pramudita¹
Safina Rahma Isro'in Maftukha²
Putri Ayu Lailatun Nafi'ah³
Widya Dwi Prastiwi⁴

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang Wiyata, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur
(60231).

Korespondensi Penulis: natasyasalsabila.22003@mhs.unesa.ac.id,
safinarahma.22008@mhs.unesa.ac.id, putriayu.22034@mhs.unesa.ac.id,
widyadwi.22047@mhs.unesa.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the status of Inter-Regional Cooperation (KAD) planning between Purworejo Regency and the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the supply of clean water for the vital needs of Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, as a driver of regional economic demand, is estimated to require a water supply of 6,000 liters per second, and the Bogowonto River in Purworejo has the potential to supply around 3,000 liters per second (50%). This cooperation involves heterogeneous actors, crossing the boundaries of horizontal jurisdiction (Central Java-DIY) and vertical levels of government (Regional-Central Government/BBWSSO), thus requiring network governance. Although the political commitment has been marked by a formal meeting between the Regent of Purworejo and the Governor of Yogyakarta in April 2024, this cooperation is still at the technical exploration stage and does not yet have a binding legal basis (MoU/PKS). The main obstacle lies in the vertical regulatory gap, where the water withdrawal permit from the Serayu Opak River Area Center (BBWSSO) is only 50 liters per second, very far from the*

Received October 31, 2025; Revised November 12, 2025; November 27, 2025

*Corresponding author: natasyasalsabila.22003@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAIR AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

maximum potential of 3,000 liters per second. In addition, the Bogowonto River is seen as a Common Pool Resource, so the use of clean water on a large scale without clear rules is prone to causing social and environmental conflicts. Therefore, the success of this KAD is highly dependent on the acceleration of the finalization of the legal basis (MoU/PKS), synchronization of licensing regulations with a simpler mechanism (one-gate system), and the integration of sustainability-based conservation policies to ensure fair and sustainable water allocation. This KAD is expected not only to create water resource efficiency, but also to serve as a model of collaborative governance across regions in Indonesia.

Keywords: *Inter-Regional Cooperation (KAD), Clean Water Supply, Yogyakarta International Airport (YIA).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk suplai air bersih bagi kebutuhan vital Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, sebagai penggerak permintaan ekonomi regional, diperkirakan membutuhkan pasokan air sebesar 6.000 liter per detik, dan Sungai Bogowonto di Purworejo memiliki potensi untuk memasok sekitar 3.000 liter per detik (50%). Kerjasama ini melibatkan aktor heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah-DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah-Pusat/BBWSSO), sehingga memerlukan tata kelola jaringan (*Network Governance*). Meskipun komitmen politik telah ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY pada April 2024, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan teknis dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat (MoU/PKS). Hambatan utama terletak pada kesenjangan regulasi vertikal, di mana izin pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru 50 liter per detik, sangat jauh dari potensi maksimal 3.000 liter per detik. Selain itu, Sungai Bogowonto dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (*Common Pool Resource*), sehingga pemanfaatan air bersih dalam skala besar tanpa aturan yang jelas rentan menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan KAD ini sangat bergantung pada percepatan finalisasi landasan hukum (MoU/PKS), sinkronisasi regulasi perizinan dengan mekanisme yang lebih sederhana (*one-gate system*), serta integrasi kebijakan konservasi berbasis keberlanjutan

untuk menjamin alokasi air yang adil dan berkelanjutan. KAD ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga berfungsi sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Kerjasama Antar Daerah (KAD), Suplai Air Bersih, Yogyakarta International Airport (YIA).

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Fitria, 2022). Namun, batas-batas administratif yurisdiksi daerah seringkali tidak sejalan dengan batas-batas geografis penyebaran sumber daya alam atau jangkauan pelayanan publik. Fenomena tersebut menuntut mekanisme kelembagaan yang kuat, yaitu dengan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD). Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan daerah (Putra, 2013).

KAD menjadi suatu cara untuk mengatasi batas-batas wilayah dan optimalisasi sumber daya. Pengembangan kerja sama antar daerah merupakan suatu tuntutan yang penting untuk diperhatikan pada era desentralisasi di Indonesia (Talitha & Hudala, 2014). Kerjasama Antar Daerah tidak hanya sekedar opsi politik, namun merupakan suatu keharusan kelembagaan untuk menjamin efisiensi ekonomi regional dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi batas-batas provinsi. Sebagaimana studi kasus Kerjasama Antar daerah, inisiatif suplai air bersih dari Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpusat pada urgensi pemenuhan infrastruktur vital bagi Yogyakarta International Airport (YIA). YIA yang berlokasi di Kulon Progo (DIY), merupakan penggerak permintaan ekonomi regional (*demand driver*) yang signifikan.

Operasi bandara dan pengembangan kawasan penyangga sekitarnya membutuhkan pasokan air bersih yang masif, diperkirakan mencapai sekitar 6.000 liter per detik. Namun, sumber daya air internal di Kulon Progo yang berbatasan langsung

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAIR AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

sangat terbatas. Secara geografis dan teknis, Sungai Bogowonto yang terletak di Purworejo menawarkan potensi suplai yang paling efisien, jauh melebihi alternatif lain seperti pengambilan dari Bendungan Bener yang memerlukan jaringan transmisi lebih panjang. Potensi debit air dari Bogowonto mencapai sekitar 3.000 liter per detik, yang berarti Purworejo berpotensi menyuplai separuh dari total kebutuhan YIA. Kebutuhan strategis YIA inilah yang mendorong KAD dengan Purworejo, memanfaatkan keunggulan komparatif regional sumber daya air. Kerjasama ini memiliki kompleksitas aktor dan lintas batas yang cukup mendalam.

Secara horizontal, kerjasama ini melibatkan dua provinsi dan dua pemerintah kabupaten, yakni Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara vertikal, kerjasama ini melibatkan setidaknya lima aktor, yaitu PDAM Tirta Perwitasari Purworejo sebagai penyedia sumber daya, Angkasa Pura atau YIA sebagai BUMN yang akan menjadi pengguna strategis dalam kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai pembuat kebijakan di tingkat daerah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sebagai regulator pusat. Perencanaan kerjasama ini ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dengan Gubernur DIY pada April 2024. Namun, komitmen kerjasama ini baru memasuki langkah awal yang harus diterjemahkan ke dalam struktur kelembagaan formal dan fungsional, yakni melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerjasama (PKS). Permasalahan ini merupakan contoh dari *Network Governance (NG)*. *Network Governance* diterapkan karena kerjasama ini melibatkan aktor yang heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah–DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah–Pusat/BBWSSO). Keberhasilan kerjasama semacam ini, berdasarkan literatur mengenai tata kelola kolaboratif, sangat bergantung pada pembangunan *trust* (kepercayaan), *commitment* (komitmen), dan *effective communication* (komunikasi efektif) di antara para pihak (Suyeno et al., 2024). Faktor-faktor ini harus dikodifikasi dalam Perencanaan Desain Kelembagaan Inklusif (*Inclusive Institutional Design*) berupa *MoU/PKS* yang kuat, untuk mengurangi konflik dan memastikan akuntabilitas (Suyeno et al., 2024).

Hambatan dalam akselerasi izin pengambilan air (dari 50 L/detik menjadi 3.000 L/detik) mengindikasikan bahwa titik kegagalan perencanaan saat ini berada pada koordinasi vertikal dengan Regulator Pusat (BBWSSO). Sedangkan Sungai Bogowonto

dalam hal ini dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (*Common Pool Resource* - CPR). Sumber daya ini rentan terhadap eksploitasi berlebihan (*Tragedy of the Commons*) jika tidak ada aturan main kelembagaan yang jelas mengenai alokasi, monitoring, dan konservasi (Ostrom, 1990). Prinsip CPR menuntut bahwa perencanaan alokasi harus menjamin manfaat finansial bagi Purworejo sebanding dengan risiko lingkungan dan sosial yang dihadapi, menjamin adanya sistem pembagian yang adil dan berkelanjutan (BPBD Purworejo, n.d.; Ostrom, 1990). Terlepas dari potensi teknis yang substansial (3.000 L/detik) dan investasi awal yang besar (teknologi membran Korea), proses perencanaan proyek ini terhambat oleh disparitas regulasi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa izin pengambilan air dari BBWSSO hingga saat ini baru mencapai 50 liter per detik, angka yang sangat kecil dibandingkan potensi suplai yang ditawarkan (Radar Jogja, 2024). Kesenjangan antara potensi teknis dan realitas izin ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam perencanaan kelembagaan dan regulasi vertikal. Tujuan spesifik dari artikel ini adalah untuk menganalisis status perencanaan dalam Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemkab Purworejo dan Pemprov DIY.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami yang selanjutnya berfokus pada catatan deskripsi yang sistematis, mendalam, dan lengkap sesuai dengan kejadian sebenar benarnya (sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan studi literatur yang mana melakukan peninjauan dari berbagai publikasi dan temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teori untuk penelitian yang akan dilakukan, studi literatur atau kepustakaan terbatas hanya pada pengumpulan artikel, jurnal dan koleksi pustaka tanpa perlu untuk melakukan penelitian di lapangan (Farida 2014). Fokus pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana rencana kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dalam penyediaan suplai air bersih untuk Yogyakarta International Airport. Adapun teknik analisis data yang dilakukan didasarkan pada model Miles dan Huberman dalam (sugiyono, 2017) yang mana teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, data yang digunakan tersebut dianalisis dan dikaji secara

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

mendalam, sistematis dan kritis yang selanjutnya akan disajikan deskriptif dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kerjasama dan Kelembagaan

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait penyediaan air bersih bagi Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bentuk kolaborasi lintas wilayah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur strategis nasional. Dari segi geografi, Purworejo memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, khususnya dari Sungai Bogowonto, yang lokasinya lebih dekat dan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk YIA dibandingkan dengan sumber lain seperti Bendungan Bener (Radar Jogja, 2024). Inisiasi kerjasama ini dimulai secara formal pada bulan April tahun 2024, ditandai dengan pertemuan resmi antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY. Pertemuan tersebut menjadi momen penting karena menunjukkan adanya kesepakatan politik antara pemerintah daerah dalam menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya air yang melintasi batas administratif. Secara kebijakan, tahap ini menggambarkan fase awal dalam proses formulasi kerja sama atau *policy initiation stage*, di mana para pemangku kepentingan mulai menyatukan persepsi dan kepentingan sebelum masuk ke tahap penyusunan dokumen hukum serta implementasi teknis di lapangan.

Meskipun komitmen politik telah terbentuk, dari segi hukum, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan dan penawaran teknis. Hingga saat ini, belum terdapat Nota Kesepahaman (MoU) yang mengikat secara resmi semua pihak yang terlibat serta menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Namun, hingga saat ini, belum ada publikasi resmi yang mengkonfirmasi penandatanganan MoU atau PKS final di antara para pihak terkait, yang mengindikasikan berlanjutnya ketidakpastian legal dan kelembagaan. Ketiadaan payung hukum ini menjadi kendala utama dalam proses perencanaan teknis dan pendanaan. Tanpa adanya MoU, tidak ada kepastian terkait pembagian tanggung jawab antar wilayah, mekanisme pembiayaan dan pengembalian investasi, hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air, serta jaminan pasokan dalam jangka panjang untuk YIA. Dalam konteks governance, situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelembagaan antara Purworejo yang menyediakan sumber daya dan

DIY yang merupakan pengguna utamanya. Oleh karena itu, percepatan proses penandatanganan MoU sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat legitimasi administratif dalam kerja sama. Kerja sama ini melibatkan berbagai aktor kunci, antara lain Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Provinsi DIY, PDAM Tirta Perwitasari Purworejo, PDAM Kulon Progo, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara, serta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sebagai lembaga teknis di bawah Kementerian PUPR (Radar Jogja, 2024). Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan berbeda, namun saling berkaitan. Pemerintah Kabupaten Purworejo berperan sebagai penyedia sumber daya air dan memiliki kepentingan ekonomi serta sosial dari pemanfaatan sumber daya lokal. Pemerintah Provinsi DIY dan PDAM Kulon Progo berfungsi sebagai penerima dan pengelola pasokan air untuk area bandara, Angkasa Pura I berkepentingan terhadap kontinuitas pasokan air guna mendukung operasional YIA. Sementara itu, BBWSSO memiliki otoritas penting terkait izin penggunaan air (SIPA) dan distribusi sumber daya air lintas wilayah. Banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan bahwa kolaborasi ini memiliki ciri khas tata kelola multi-aktor (Suyeno et al., 2024), dimana keberhasilan pelaksanaan sangat tergantung pada koordinasi antar lembaga yang baik dan keselarasan kepentingan antara pemerintah daerah, lembaga teknis, dan badan usaha.

Analisis Potensi Teknis dan Hambatan Perencanaan Regulasi

Sungai Bogowonto dinilai strategis karena secara geografis lokasinya hanya berjarak sekitar 3,5 kilometer dari kawasan Bandara YIA, sehingga efisien secara teknis dan ekonomis dalam hal transmisi air. Menurut data teknis dari PDAM, potensi aliran air Sungai Bogowonto diperkirakan mencapai sekitar 3.000 liter per detik, yang artinya dapat memenuhi sekitar 50% dari total kebutuhan pasokan air bersih YIA yang diperkirakan sebesar 6.000 liter per detik (Radar Jogja, 2024). Potensi ini menandakan adanya kesempatan nyata untuk mengembangkan kerja sama regional dalam penyediaan air yang melintasi batas provinsi antara Purworejo (Jawa Tengah) dan Kulon Progo (DIY). Untuk menjamin bahwa kualitas air memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri penerbangan, PDAM Tirta Perwitasari telah menyiapkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) modern di Desa Dadirejo. Instalasi ini dirancang dengan menggunakan teknologi membran dari Korea Selatan dengan total investasi sekitar Rp 65

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

miliar. Membrane technology ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan kualitas air yang lebih baik ketimbang sistem tradisional, terutama dalam efisiensi penyaringan partikel kecil, bakteri, dan zat kimia berbahaya. Dengan penerapan teknologi ini, PDAM berkomitmen untuk menyediakan air bersih yang memenuhi standar internasional, sehingga mendukung operasional bandara internasional seperti YIA. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern juga merupakan upaya PDAM untuk meningkatkan citra perusahaan daerah yang responsif terhadap inovasi dan kebutuhan industri strategis nasional. Dari sisi regulasi, pelaksanaan teknis proyek ini masih berada pada tahap perizinan yang dilakukan secara bertahap oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air antar provinsi di bawah Kementerian PUPR. Sampai saat ini, jumlah izin pengambilan air yang diberikan baru mencapai 50 liter per detik, yang sangat jauh dari potensi maksimal sebesar 3.000 liter per detik. Jarak yang sangat besar antara potensi teknis dan izin operasional ini menunjukkan bahwa kerja sama masih dalam fase awal pengembangan izin administratif dan belum mencapai tingkat operasional penuh. Proses perizinan ini membutuhkan berbagai kajian teknis, termasuk studi kelayakan lingkungan, rekomendasi mengenai kualitas air, dan pengaturan kuota pengambilan air untuk menjaga agar ekosistem sungai tidak terganggu. Tantangan pada aspek hukum dan lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya pelaksanaan proyek, karena pemerintah pusat melalui BBWSSO harus memastikan bahwa pemanfaatan air sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat lokal serta lingkungan sekitar.

Kendala yang Dihadapi

Perencanaan kerjasama suplai air bersih antara Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memenuhi kebutuhan Yogyakarta International Airport (YIA) menghadapi berbagai kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Lintas Batas Administratif dan Kewenangan

Kerja sama ini melibatkan dua provinsi dengan sistem pemerintahan, peraturan daerah, dan pengelolaan sumber daya air yang berbeda, proses koordinasi menjadi kompleks dan memakan waktu. PDAM Tirta Perwitasari Purworejo, sebagai penyedia air utama, berada di bawah tanggung jawab Jawa

Tengah, sementara YIA dan daerah yang menerima manfaat di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini menyebabkan setiap kebijakan harus melalui prosedur lintas batas mulai dari permohonan izin pengambilan air oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sampai diskusi nota kesepahaman (MoU) antara provinsi. Ketidakadaan landasan hukum resmi yang mengikat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi di antara para pihak masih bersifat informal, bergantung pada inisiatif para pemimpin daerah. Dalam konteks tata kelola jaringan, kondisi ini menunjukkan kurangnya integrasi di antara berbagai jaringan institusi, dimana belum ada struktur yang memadai untuk menyelaraskan kepentingan antara penyedia dan penerima manfaat.

2. Kesenjangan antara Kapasitas Potensial Sumber Daya Air dan Izin Resmi yang Telah Diterbitkan

Sungai Bogowonto memiliki potensi air sebanyak 3.000 liter per detik, yang cukup untuk memenuhi separuh kebutuhan YIA yang mencapai 6.000 liter per detik. Namun, izin penggunaan air yang diberikan oleh BBWSSO hanya sebesar 50 liter per detik, atau kurang dari 2% dari total kapasitas kemampuannya. Jarak yang sangat besar ini membuat PDAM Purworejo tidak dapat segera memanfaatkan potensi sumber air maksimal, dan sekaligus menghalangi perencanaan teknis distribusi. Selain itu, pengembangan sistem transmisi air bersih dari Purworejo ke YIA memerlukan jaringan pipa lintas daerah dan sistem kontrol tekanan air yang stabil agar tidak terjadi kehilangan volume (*non-revenue water*).

3. Kurangnya investasi infrastruktur

Investasi infrastruktur menjadi faktor penentu keberlanjutan kerja sama ini. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Dadirejo yang menggunakan teknologi membran dari Korea dengan biaya Rp 65 miliar merupakan langkah awal yang signifikan. Namun, untuk memastikan sistem ini berjalan secara optimal dan dapat menjangkau YIA, dibutuhkan investasi tambahan untuk jaringan pipa transmisi antar wilayah, booster pump, serta reservoir cadangan yang dapat menjaga keberlangsungan pasokan. Besarnya biaya ini memerlukan adanya skema pembiayaan jangka panjang serta kejelasan dalam pembagian tanggung jawab finansial antara PDAM Purworejo, pemerintah

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAIR AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

daerah DIY, dan Angkasa Pura. Tanpa adanya skema pembiayaan yang jelas berdasarkan pengembalian investasi, keberlanjutan ekonomi proyek ini bisa terancam, terutama jika tidak ada kepastian dari YIA mengenai volume pembelian air.

4. Ketergantungan lingkungan

Keberlanjutan sumber air menjadi isu yang sangat penting. Sungai Bogowonto adalah sumber daya bersama yang alirannya sangat tergantung pada curah hujan. Pada musim kemarau yang berkepanjangan, aliran sungai bisa menurun secara signifikan, yang berpotensi mengganggu pasokan air ke YIA serta masyarakat Purworejo. Tanpa adanya sistem pemantauan yang terpadu dan kebijakan konservasi yang tegas, pemanfaatan air bersih dalam skala besar dapat menimbulkan konflik sosial antara kepentingan industri dan kebutuhan warga. Maka dari itu, perlu diimplementasikan strategi konservasi untuk daerah tangkapan air, serta efisiensi penggunaan dan alokasi air yang adil dan responsif terhadap perubahan iklim.

Desain Kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Komunal yang Berkelanjutan

Keberlanjutan sumber air menjadi isu yang sangat penting dalam fase perencanaan KAD. Sungai Bogowonto adalah sumber daya bersama (*Common Pool Resource*) yang alirannya sangat tergantung pada curah hujan. Pada musim kemarau yang berkepanjangan, aliran sungai bisa menurun secara signifikan, yang berpotensi mengganggu pasokan air ke YIA serta masyarakat Purworejo (BPBD Purworejo, n.d.). Pengambilan air dalam skala besar tanpa pengaturan yang jelas dapat memicu konflik sumber daya dan ancaman lingkungan (Ostrom, 1990). Kerjasama suplai air ini melampaui transaksi komersial semata, tapi juga merupakan instrumen strategi pengembangan wilayah. Dengan menjamin pasokan air bersih berstandar internasional, KAD ini memungkinkan YIA beroperasi secara optimal, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan ekonomi pariwisata, logistik, dan industri di kawasan Kedu-DIY secara keseluruhan, termasuk Purworejo (Radar Jogja, 2024). Oleh karena itu, perencanaan kelembagaan KAD harus mencakup strategi konservasi untuk daerah

tangkapan air dan desain sistem pemantauan terpadu (Ostrom, 1990; Monitoring System, n.d.).

Mekanisme perencanaan Kerjasama Antar Daerah yang efektif harus memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan batas sumber daya dan pengguna secara jelas (Bogowonto sebagai sumber daya).
2. Mengatur aturan pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi lokal, terutama prioritas alokasi saat krisis air.
3. Memasukkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari suplai air ke YIA untuk didanai kembali ke program konservasi dan mitigasi risiko kekeringan yang dihadapi oleh BPBD Purworejo (BPBD Purworejo, n.d.).
4. Merancang sistem monitoring kuantitas dan kualitas air secara real-time yang dapat diakses bersama oleh semua pemangku kepentingan (*Monitoring System*, n.d.), guna menjamin alokasi air yang adil dan responsif terhadap perubahan iklim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerjasama suplai air bersih antara Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendukung operasional Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) merupakan contoh nyata dari kolaborasi lintas wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi. Inisiatif ini bukan hanya soal penyediaan sumber air, tetapi juga simbol sinergi antardaerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Pulau Jawa. Namun, agar potensi besar kerja sama ini dapat terealisasi secara optimal, dibutuhkan landasan hukum yang kuat dan mekanisme koordinasi yang jelas. Oleh karena itu, percepatan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* serta Perjanjian Kerjasama (PKS) antara seluruh pemangku kepentingan menjadi prioritas agar setiap pihak memiliki kepastian hukum dan kejelasan peran dalam pelaksanaan program. Selain aspek hukum, percepatan proses perizinan pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) juga menjadi faktor krusial. Tanpa adanya izin resmi dengan kapasitas maksimal hingga 3.000 liter per detik, pemenuhan kebutuhan air YIA dan kawasan sekitarnya tidak dapat dijamin secara berkelanjutan. Pemerintah daerah

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

bersama kementerian teknis perlu menginisiasi *one-stop service* dalam proses perizinan agar hambatan birokratis dapat diminimalkan. Di sisi lain, pembiayaan infrastruktur seperti instalasi teknologi membran dan jaringan pipa utama harus dirancang dengan skema investasi jangka panjang yang memberikan *return on investment (ROI)* yang jelas bagi para investor dan tidak membebankan APBD daerah. Untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bersih, penting dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi bersama yang melibatkan pihak-pihak teknis dari kedua daerah. Sistem ini dapat menggunakan sensor kualitas air berbasis *Internet of Things (IoT)* dan *dashboard* terpadu yang memantau debit serta kualitas air secara real time. Kolaborasi ini akan memperkuat adaptasi terhadap musim kemarau dan memastikan bahwa pelayanan air bersih tidak terganggu oleh fluktuasi cuaca ekstrem. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga memperkuat tata kelola air lintas daerah sebagai model kolaborasi berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada penyelarasan tiga aspek utama: (1) kepastian hukum dan kelembagaan melalui MoU dan PKS, (2) sinkronisasi regulasi perizinan antar-tingkat pemerintahan, dan (3) integrasi kebijakan konservasi sumber daya air berbasis keberlanjutan. KAD ini tidak hanya berfungsi sebagai proyek penyediaan air, tetapi juga sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah yang berpotensi memperkuat integrasi ekonomi kawasan Kedu DIY.

Saran

1. **Percepatan Legalitas Kerjasama:** Pemerintah Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo perlu segera memfinalisasi MoU dan PKS sebagai dasar hukum kerja sama, dengan mencakup aspek pembagian tanggung jawab, mekanisme pembiayaan, dan jaminan pasokan air jangka panjang. Kementerian Dalam Negeri dapat berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas provinsi untuk mempercepat proses ini.
2. **Sinkronisasi Perizinan dan Regulasi:** Pemerintah daerah bersama Kementerian PUPR melalui BBWSSO perlu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan pengambilan air lintas provinsi dengan mekanisme *one-gate system*. Hal ini penting agar potensi sumber daya air Sungai Bogowonto dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip keberlanjutan.

- 3. Pembiayaan Infrastruktur Kolaboratif:** Dibutuhkan model pembiayaan *Public-Private Partnership (PPP)* antara PDAM, Pemerintah Daerah, dan PT Angkasa Pura I untuk menjamin keberlanjutan investasi dan *return on investment (ROI)*. Skema jangka panjang (25–30 tahun) dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian instalasi teknologi membran dan pembangunan jaringan transmisi.
- 4. Sistem Monitoring dan Konservasi Terpadu:** Pemerintah daerah bersama BBWSSO perlu membentuk *Joint Water Management Board* untuk melakukan pemantauan kuantitas dan kualitas air secara real-time. Selain itu, sebagian pendapatan dari penjualan air ke YIA harus dialokasikan kembali untuk program konservasi daerah tangkapan air di Purworejo guna menjaga keseimbangan ekologi sungai.

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAIR AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)

DAFTAR REFERENSI

- BPBD Kabupaten Purworejo. (t.thn.). Diambil kembali dari Perjanjian Kerjasama Pengadaan Air Bersih: <https://bpbd.purworejokab.go.id/perjanjian-kerjasama-pengadaan-air-bersih>
- Farida Nugrahani. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian. Cakra Book.
- Fitria, W. (2022). Implementasi Kerjasama Daerah Kota Tangerang dan Kabupaten Subang dalam Pengembangan Aplikasi SIMASN.
- Koranjuri.com. (2022). PDAM Purworejo Jajaki Kerjasama dengan Bandara YIA.
- Koranjuri.com.Kurnia, H. (2024). Temui Sultan, Pemkab Purworejo Buka Peluang Kerjasama Air Bersih YIA. Purworejo: kedu.suamamerdeka.
- Ostom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*.
- Putra, I. R. (2013). Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Suyeno, & dkk. (2024). Collaborative water governance model for potable urban water supply in Riau Province, Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*.
- Talitha, T., & Hudalah, D. (2014). Model Kerjasama Antar Daerah dalam Perencanaan Sistem Transportasi Wilayah Metropolitan Bandung Raya. *Jurnal Tata Loka*.